

FPLKD Ikut Mewujudkan Kabupaten Pacitan Tuntas Adminduk

Subardi kaget ketika perangkat Desa Pucangombo memanggilnya dari kebun yang tak jauh dari rumahnya di Dusun Pucangombo. Pria 70 tahun itu baru tahu, Sarmidi, sang kepala desa, turut serta di dalamnya. Sarmidi bersama Sriyanto (Kasi Pelayanan) dan Nur Wijayanti (Kaur Keuangan) datang membawa KTP, kartu keluarga (KK) dan akta kematian istri Subardi. Dua hari sebelumnya, Subardi menitipkan berkas persyaratan kepada Sriyanto dan Nur Wijayanti yang juga bertugas sebagai Fasilitator Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H), Desa Pucangombo.

Ia merasa perlu memperbaharui dokumen kependudukan, sepeninggal istrinya. Menurut Subardi, karena ada Fasilitas Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD), ia tak perlu susah-susah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil), yang letaknya di pusat kota Pacitan. “Saya mengucapkan terimakasih kepada petugas desa yang telah membantu. Ini sangat menolong kami, dipermudah dan lancar. Berapa saya harus membayar untuk ini?” tanya Subardi.

FPLKD adalah inovasi dukungan layanan adminduk di desa. Salah satu komponen FPLKD adalah Fasilitator Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H) yang membantu masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan mendapatkan dokumen kependudukan.

Pada 2018, Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan dukungan KOMPAK mengadopsi FPLKD. Keberadaan FPLKD diperkuat dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa Kabupaten Pacitan. Pada akhir 2021, seluruh 171 desa di Pacitan telah memiliki Fasilitator PS2H.

Mendengar pertanyaan itu, Sarmidi, Kepala Desa Pucangombo, spontan tertawa. Dia menegaskan, seluruh layanan terkait dokumen kependudukan, tidak dipungut biaya, termasuk untuk layanan jemput dan antar berkas. Subardi mengaku bersyukur tidak perlu ke kantor Dinas Dukcapil.

Dulu masyarakat harus mengurus dokumen kependudukannya sendiri langsung ke Dinas Dukcapil yang berjarak 40 km dari Pucangombo dan membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Biaya transportasinya pun tak sedikit. Masyarakat harus mengeluarkan uang sebesar Rp30.000 sekali jalan. Akibatnya mereka enggan mengurus dokumen kependudukan karena tak punya cukup uang dan waktu. Perjalanan panjang selama 4 jam pulang-pergi pun terasa sangat melelahkan.

Supardiyanto, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pacitan mengatakan selain jauhnya jarak ke ibu kota kabupaten, kondisi topografi Kabupaten Pacitan yang berbukit serta belum pahamnya masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan membuat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di kabupaten ini masih jauh dari harapan. “Dulu sebelum ada FPLKD, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun baru 47%. Jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 80% pada tahun 2017,” jelasnya.



Selama masa pandemi, FPLKD dinilai mampu membantu warga mengurangi potensi tertular virus COVID-19. Warga tidak perlu datang ke kantor desa karena kepala dusun dan perangkat desa yang lain yang lebih banyak datang ke rumah warga yang membutuhkan

Sekarang Subardi dan warga Pucangombo senang, karena pengurusan dokumen kependudukan bisa dilakukan dari rumah. Dokumen pun bisa jadi hanya dalam waktu 2 hari.

“Dari rumah ke kantor desa sekitar 4 kilometer. Jalannya terjal dan berbukit. Kalau jalan kaki bisa 45 menit. Di musim hujan, bisa lebih lama dan berbahaya lagi,” tutur Subardi. “Sekarang *nggak* perlu juga datang ke kantor desa karena staf kantor desa yang datang ambil berkas dan antar dokumen kependudukan yang sudah selesai,” imbuhnya.

Dari rumah Subardi, Sarmidi mengantar dokumen kependudukan milik keluarga Tumiyatin. Warga Dusun Mojo itu mengurus KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran untuk anak dan cucunya yang baru lahir. Dokumen itu juga selesai cepat. Keluarga ini juga tidak perlu datang ke kantor desa karena berkas persyaratan mereka titipkan ke kepala dusun yang setiap hari mengumpulkan berkas warga yang membutuhkan dokumen kependudukan.

Namun, tak semua warga meminta bantuan kepada perangkat desa untuk layanan jemput dan antar berkas kependudukan. Sejumlah warga memilih datang ke kantor desa untuk mengurus dan mengambil berkas yang mereka butuhkan. Biasanya, lokasi rumah warga dengan kantor desa tidak begitu jauh. Suyanto salah satunya. Ia datang ke kantor desa, untuk mengambil KTP miliknya.

“Kalau masyarakat yang tinggalnya jauh agak susah. Nah, dengan ada pelayanan semacam ini mengurus dokumen adminduk jadi lebih mudah. Masyarakat sangat terbantu, bisa mengurus di desa. Kalau yang dekat, ya biasanya langsung datang ke kantor desa,” kata Suyanto.

Pada 2021, penduduk desa Pucangombo mencapai 6.782 jiwa dengan 2.280 keluarga. Desa ini terdiri dari empat dusun, yakni Pucangombo, Mojo, Kaliogon dan Pager. Kontur desa berbukit-bukit dan terjal. Dusun terjauh bahkan berjarak sekitar 8 kilometer dari kantor desa. Sulitnya akses untuk mobilitas warga, membuat warga desa kesulitan mengurus dokumen kependudukan mereka. FPLKD sejauh ini, banyak membantu warga usia lanjut (lansia) dan penyandang disabilitas.

Kepala Desa Pucangombo, Sarmidi mengatakan, FPLKD membuka kesempatan kepada desa untuk mendukung layanan adminduk. “Jadi administrasi kependudukan dari Dinas Dukcapil yang

diperbantukan ke desa itu ada KK, akta kematian, akta kelahiran dan surat pindah tempat. Semuanya sudah bisa dicetak di desa. Kecuali Kartu Identitas Anak dan Kartu Tanda Penduduk,” katanya.

Supardiyanto mengatakan pencetakan dokumen kependudukan di desa ini dapat dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan dukungan KOMPAK meluncurkan layanan adminduk *online* melalui Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) pada 2020 guna memastikan masyarakat tetap dapat mengurus dokumen kependudukannya dengan mudah, cepat, dan aman. “Jadi fasilitator PS2H desa cukup mengirim foto atau hasil *scan* berkas persyaratan melalui SIKAB yang terhubung dengan kantor dinas dukcapil. Nanti, dokumen kependudukan yang telah diterbitkan akan dikirim ke desa melalui aplikasi SIKAB juga. Nah, dokumen itu kemudian bisa dicetak mandiri di desa.”

Kemudahan mengurus dokumen kependudukan ini, menurut Sarmidi mampu meningkatkan kesadaran warga untuk memiliki dokumen kependudukan. Sebelumnya, warga desa apatis terhadap dokumen kependudukan. Mereka merasa tidak membutuhkannya. Alih-alih memiliki, memperbaharui dokumen kependudukan saja mereka enggan. Kondisi ini menyulitkan Sarmidi menyusun program-program untuk warga desa.

“Dulu banyak yang *ogah-ogahan* mengurus KTP. Mereka bilang, sudah tua, *gawe opo*. Untuk apa? Setelah mereka mengerti manfaatnya, sekarang, di tahun 2021, alhamdulillah, 90% penduduk sudah punya KK, akta kelahiran, dan KTP,” untkapnya.



FPLKD membuka kesempatan kepada desa untuk mendukung layanan adminduk

Kantor Desa Pucangombo mencatat peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi oleh Fasilitator Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H). Pada 2019 misalnya, ada 802 dokumen kependudukan yang diajukan warga. Angka ini naik lebih dari dua kali lipat dari sebelum ada FPLKD. Kemudian pada 2020, ada 178 dokumen kependudukan yang diurus warga. Sementara hingga Oktober 2021, ada 225 dokumen kependudukan.

“Dengan adanya identitas kependudukan, masyarakat bisa mengakses program bantuan sosial pemerintah, karena syarat mendapat bansos itu harus ada KTP. Mau mendapat BLT-Dana Desa ya harus punya KK dan KTP. Sekarang, kalau mau vaksin juga harus punya Nomor Induk Kependudukan yang ada di KK. Jadi memiliki dokumen kependudukan itu membawa banyak manfaat buat masyarakat,” untkap Sarmidi.

Selama masa pandemi, FPLKD dinilai mampu membantu warga mengurangi potensi tertular virus COVID-19. Pasalnya, layanan ini membuat mobilitas warga menurun. Warga tidak perlu datang ke kantor desa karena kepala dusun dan perangkat desa yang lain yang lebih banyak datang ke rumah warga yang membutuhkan. Juga ketika dokumen kependudukan jadi, perangkat desa-lah yang mendatangi rumah warga.

Pada 2022, Desa Pucangombo menargetkan seluruh warga memiliki KK dengan *barcode*. "Sekarang di KK ada tanggal pernikahan dan ada *barcode*-nya. Pak kepala desa mempunyai rencana pada pada akhir 2022, KK di Desa Pucangombo sudah diperbaharui semuanya. Mulai bulan September kemarin, pemerintah desa sudah turun ke dusun untuk melakukan validasi data penduduk dari data Dinas Dukcapil. Apabila masih ada data lama langsung kami perbaharui," ungkap Nur Wijayanti, fasilitator PS2H Desa Pucangombo.

Ardian Wahyudi, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Kabupaten Pacitan, mengakui, FPLKD berkontribusi meningkatkan cakupan dokumen kependudukan. Dari data Pemerintah Kabupaten Pacitan, sampai semester 1 tahun 2021, setidaknya 94,50% warga sudah memiliki e-KTP. Kemudian cakupan KK sudah mencapai 97,64%. Sementara cakupan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun mencapai 97%. Pemanfaatan SIKAB untuk pengurusan dokumen kependudukan menurut Ardian membantu fasilitator PS2H untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang tinggal di perdesaan, khususnya kelompok miskin dan rentan.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Pacitan akan memaksimalkan pemanfaatan SIKAB sebagai basis data pemerintah daerah. "Karena SIKAB sudah digunakan untuk layanan adminduk maka kita berencana memanfaatkan fungsi ini sekaligus untuk mempercepat proses penyelarasan DTKS dengan data kependudukan, sehingga mampu meminimalkan kesalahan data penerima bantuan sosial pemerintah," ujar Ardian.
